



Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten

Nur Saribulan^{1*}, Hardiyanto Rahman¹, Saddam Rasanjani²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

² Universitas Syiah Kuala, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2023

Revised July 26, 2023

Accepted August 24, 2023

Available online August 31, 2023

Kata Kunci:

Analisis Bibliometrik; Analisis Konten; Indonesia; Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Keywords:

Bibliometric Analysis; Content Analysis; Indonesia; Poverty Eradication Policies; Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren publikasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis bibliometrik dan analisis konten pada artikel terpublikasi pada database Scopus, Microsoft Excel dan Vosviewer digunakan sebagai alat analisis dan visualisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi publikasi, tahun 2022 merupakan tahun publikasi artikel tertinggi dimana terdapat 35 artikel yang terpublikasi, dan tahun 2019 merupakan tahun dimana sitasi paling banyak dilakukan. Untuk hubungan co-authorship, terdapat sembilan negara afiliasi penulis yang juga dibagi ke dalam 33 cluster. Dalam hal kebijakan, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya dalam penanganan kemiskinan secara langsung seperti manajemen alokasi dana APBN/APBD, pembangunan ekonomi, program jaminan sosial, program pemerataan dan kebijakan manajemen filantropi islam, sedangkan upaya tidak langsungnya adalah melalui manajemen industri pariwisata, program pengembangan pertanian dan kehutanan, penguatan program berbasis kesehatan dan perbaikan pelayanan publik. Riset dengan topik recovery, bencana, zakat, reformasi fiskal, ekonomi inklusi dan kemiskinan kronis merupakan topik pengentasan kemiskinan yang masih jarang dibahas dan berpotensi menjadi tema/topik penelitian di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to determine the publication trends on poverty reduction in Indonesia. This article is carried out through bibliometric and content analysis by capturing scientific articles based on the Scopus database. At the same time, Microsoft Excel and Vosviewer are used for data extraction and visualization. The result shows that in terms of publications, 2022 is the most productive year, with 35 articles, and 2019 is the year with the most citations of articles. For Co-authorship analysis, there are nine affiliated countries of authors, divided into 33 clusters formed as co-authorship relationships. In terms of policies/programs, the government has conducted strategies for poverty reduction both direct ways by managing national and local allocation funds, economic development, social safety net, Policies on equity, and Islamic philanthropy management policies, while for indirect ways through the tourism industry, agriculture, and forestry development program, health-based program and the improvement of public services. Research topics on recovery, recovery, disaster, zakat, fiscal reform, economic inclusion, and chronic poverty are the themes that need to be explored and could be explored for further research.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasar hidupnya agar tetap bertahan dan mampu mengembangkan hidup yang bermartabat (Arifuzzaman et al., 2021). Permasalahan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi trending pembicaraan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan kemiskinan dalam sepanjang sejarah Indonesia terus menjadi masalah besar (Prawoto, 2009). Tentu saja, isu dan permasalahan ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas karena isu ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan.

*Corresponding author

E-mail addresses: nursaribulan@ipdn.ac.id

Harniati dalam Bhinadi (2017) menjelaskan bahwa dimensi kemiskinan begitu kompleks sehingga diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis kemiskinan yaitu kemiskinan alamiah dikarenakan kualitas dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang rendah, kemiskinan kultural dikarenakan sikap yang tidak ingin mengubah kehidupannya meskipun terdapat yang ingin membantunya, dan kemiskinan struktural yang disebabkan tatanan kelembagaan dengan kebijakan pemerintah menyebabkan masyarakat terkurung dan terus mengalami kemiskinan sehingga menjadi turun temurun. BPS mengkategorikan penduduk miskin dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Adapun Konsep ini terkait dengan *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-gizi yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk tergolong miskin apabila rata-rata pengeluaran per penduduk per bulan berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022a). Lalu jika penduduk miskin dikategorikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran atau pendapatan dibawah per kapita per bulan sebagai penduduk miskin, maka penduduk "hampir miskin" merupakan penduduk yang kondisinya sedikit diatas garis kemiskinan dari standar yang telah dibuat atau disebut kelompok rentan miskin sebagaimana sebutannya oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Hadi et al., 2019).

Permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di seluruh belahan dunia. Beberapa negara yang masuk dalam kategori paling miskin di dominasi dari benua Afrika, salah satu penyebabnya karena pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank berdasarkan urutan GNI (*Gross National Income*) per kapita urutan negara paling miskin yaitu Burundi, Somalia, Madagaskar, Afghanistan. Sierra Leone, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Eritrea (Redaksi OCBC NISP, 2022). Sedangkan Indonesia masuk dalam daftar 100 negara dengan penduduk termiskin di dunia (Amani, 2022). Menurut World Population Review, Indonesia menduduki urutan ke 73 paling miskin pada tahun 2020 dan pada halaman Global Finance tahun 2022 menempatkan Indonesia pada urutan ke-91 di dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Purchasing Power Parity (PPP) sebesar USD 14.535 (Amani, 2022) dengan standar yang telah ditetapkan oleh World Bank pada tahun 2021 sebesar \$1.046 per kapita pada tahun 2021 (Redaksi OCBC NISP, 2022). Untuk peringkat indeks daya saing global, Indonesia turun dari peringkat 45 tahun 2018 menjadi 50 tahun 2019 dari 140 negara dan urutan ke empat pada level ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Roziqin et al., 2021).

Adapun penyebab kemiskinan bersifat kompleks, menurut Cox dalam Bhinadi (2017) penyebab kemiskinan yaitu (i) kemiskinan karena adanya globalisasi (kemiskinan dengan adanya negara pemenang yaitu negara maju sedangkan negara yang kalah yaitu negara berkembang yang semakin sulit untuk maju dikarenakan persaingan dan pasar bebas sehingga jumlah kemiskinan negara berkembang akan terus lebih banyak dibandingkan dengan negara maju), (ii) Kemiskinan disebabkan pembangunan (kondisi pembangunan yang semakin meminggirkan masyarakat perdesaan sehingga masyarakat miskin perdesaan mengalami kesulitan dalam berkembang karena kecepatan pertumbuhan kawasan perkotaan tidak mampu diimbangi oleh masyarakat perdesaan), (iii) kemiskinan sosial (adanya kondisi social masyarakat yang tidak memberikan dampak positif pada kelompok masyarakat lainnya. Misalnya kemiskinan pada perempuan dan kelompok yang menjadi minoritas dikarenakan adanya kondisi sosial yang tidak menguntungkan seperti bias gender, terjadi diskriminasi dan eksploitasi) dan (iv) kemiskinan konsekuensial (kemiskinan yang disebabkan faktor eksternal misalnya saja bencana alam, lingkungan yang rusak, tidak adanya sumberdaya alam yang dapat diolah ditambah dengan penduduk yang banyak sehingga menyebabkan kemiskinan terjadi dimasyarakat).

Runtuhnya pemerintahan atau suatu negara bisa disebabkan karena tidak mampunya penyelenggara pemerintahan mendorong menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengisi perut rakyatnya. Kelaparan terjadi dimana-mana, masyarakat banyak yang tidak mampu berobat, tidak mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang cukup layak, bahkan makanan layak untuk dikonsumsi, hal ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 menjadi kendala utama pada sektor ekonomi (David et al., 2021; Govender et al., 2020). Tidak mampunya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan mengakibatkan permasalahan tambahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat bahkan akan mempengaruhi situasi politik suatu negara.

Dalam menangani permasalahan kemiskinan, upaya penanganan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dilakukan pada era saat ini saja. Penanganan kemiskinan bahkan telah dilaksanakan sejak masa orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada era Soekarno dibuat kebijakan dalam hal reformasi lahan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Alika, 2018). Selanjutnya, secara serius Indonesia telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan sejak Orde baru pada periode 1976-1996 tingkat kemiskinan Indonesia yang semula 40% turun sangat drastis menjadi 11% (Purwanto, 2007). Keberhasilan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan harus melambat sementara dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, dimana nilai mata uang rupiah menjadi anjlok terhadap dollar Amerika Serikat.

Bahkan Rezim Orde baru saat itu menjadi runtuh dan menimbulkan situasi politik yang tidak stabil mengakibatkan perbaikan aspek kehidupan masyarakat menjadi tidak fokus. Inflasi yang melonjak hingga 88% dan angka kemiskinan juga langsung meningkat di antara 27-28 % yang diibaratkan seperti pasir yang terhempas dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun di negara lain juga (Alika, 2018).

Upaya pemerintah bersama masyarakat dalam pengentasan kemiskinan menunjukkan adanya perubahan. Meskipun sempat dilanda pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan peningkatan jumlah masyarakat miskin hingga pada tahun 2021, namun telah dapat ditekan pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26.16 juta orang atau 9.54%, penduduk miskin turun 0.34 juta orang dibandingkan pada bulan September 2021 atau 1.38 juta orang pada bulan Maret tahun 2021 dari total penduduk Indonesia (Nurhanisah, 2022). Tren penurunan kemiskinan penduduk Indonesia ternyata tidak sejalan dengan tekanan peningkatan harga komoditas di masyarakat bahkan secara global khususnya harga pangan dan energi misalnya saja minyak goreng yang sempat langka di peredaran. Keberhasilan pemerintah untuk terus menjaga pertumbuhan perekonomian memberikan dampak positif yang perlu terus dijaga terutama pada tahun 2023 dengan ramalan akan terjadi resesi ekonomi dengan ditandai Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, terjadi peningkatan jumlah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi riil yang bernilai negatif (Humas UIR, 2022).

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	2021 (%)	2022 (%)	No	Provinsi	2021 (%)	2022 (%)
1	Papua	27.38	26.56	19	Sumatera Utara	8.49	8.42
2	Papua Barat	21.82	21.33	20	Jawa Barat	7.97	8.06
3	Nusa Tenggara Timur	20.44	20.05	21	Jambi	7.67	7.62
4	Maluku	16.3	15.97	22	Sulawesi Utara	7.36	7.28
5	Gorontalo	15.41	15.42	23	Riau	7	6.78
6	Aceh	15.53	14.64	24	Kalimantan Utara	6.83	6.77
7	Bengkulu	14.43	14.62	25	Kalimantan Barat	6.84	6.73
8	Nusa Tenggara Barat	13.83	13.68	26	Kalimantan Timur	6.27	6.31
9	Sulawesi Tengah	12.18	12.33	27	Kep. Riau	5.75	6.24
10	Sumatera Selatan	12.79	11.9	28	Maluku Utara	6.38	6.23
11	Sulawesi Barat	11.85	11.75	29	Banten	6.5	6.16
12	Lampung	11.67	11.57	30	Sumatera Barat	6.04	5.92
13	DI Yogyakarta	11.91	11.34	31	Kalimantan Tengah	5.16	5.28
14	Sulawesi Tenggara	11.74	11.17	32	DKI Jakarta	4.67	4.69
15	Jawa Tengah	11.25	10.93	33	Bali	4.72	4.57
16	Jawa Timur	10.59	10.38	34	Kalimantan Selatan	4.56	4.49
17	Indonesia	9.71	9.54	35	Kep. Bangka Belitung	4.67	4.45
18	Sulawesi Selatan	8.53	8.63				

Sumber : diolah dari BPS RI (2022)

Tabel 1 menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin berdasarkan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Data menunjukkan bahwa dari 34 provinsi, terdapat 16 Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat persentase kemiskinan lebih tinggi diatas rata-rata nasional dan terdapat 18 Provinsi telah dibawah angka kemiskinan nasional (9.54%). Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Provinsi Papua sebesar 26.56%, Provinsi Papua Barat sebesar 21.33%, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20.05%. Selanjutnya untuk daerah dengan angka kemiskinan terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung sebesar 4.45%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4.49, dan Provinsi Bali 4.57%.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan maupun program. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Selain itu pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global karena kompleksitas masalah pembangunan dengan berbagai dinamika membutuhkan penanganan yang efektif dan efisien (Baumgartner, 2014; Nurfindarti, 2019). Pembangunan yang berhasil apabila terjadi peningkatan pembangunan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran menurun (Purnomo & Istiqomah, 2019). Dalam peraturan presiden tersebut telah ditetapkan program perlindungan sosial sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan meliputi 3 (tiga) program yaitu program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, dan program Indonesia sehat (Perpres RI No 166 Tahun 2014, 2014). Akan tetapi

menurut Wasisto Raharjo Jati bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih terdapat permasalahan pada proses perumusan strategi kebijakan sehingga belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan sampai ke akarnya (Hadi et al., 2019).

Selain program pengentasan kemiskinan, salah satu upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia telah diwujudkan melalui otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang disertai juga kewajiban daerah dalam menyejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan di daerah. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diharapkan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah masing-masing sehingga dapat menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah (Roziqin et al., 2021).

Melalui otonomi daerah yang sudah dimiliki setiap pemerintah daerah maka program penanggulangan kemiskinan setiap daerah juga telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, misalnya saja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan 4 (empat) program penanggulangan kemiskinan yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung serta program beras daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ataupun penyediaan informasi dalam sosial media dalam mengenalkan program/kebijakan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Hilda et al., 2022; Cristy et al., 2022).

Salah satu alternatif yang dapat dipergunakan oleh pemerintah yaitu melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), namun belum dapat dikelola dengan baik (Wirba, 2023). Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya dana desa yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia namun masalah kemiskinan masih ada sampai sekarang (Imawan & Purwanto, 2020; Permatasari et al., 2021), skema penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) semula satu kali dalam tiga bulan berubah menjadi setiap bulan (Tristanto et al., 2022). Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah pusat dan daerah telah membuat program-program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah dan realitas kebutuhan masyarakat. Hal tersebut merupakan inovasi yang menjadi keharusan agar pelayanan publik berjalan dengan baik (Cinar et al., 2022; Torfing, 2019). Melihat banyaknya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan daerah. Namun permasalahan kemiskinan ini belum juga dapat dituntaskan sampai ke akarnya. Permasalahan kemiskinan masih terus menjadi permasalahan yang menjadi prioritas di Indonesia.

Sudah terdapat banyak penelitian yang mengangkat program yang telah dilaksanakan, namun studi yang menjelaskan terkait apa saja penanggulangan kemiskinan yang telah dan belum pernah dilakukan pemerintah masih jarang, sehingga penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkaji langkah apa saja yang telah dan belum dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pengkajian akan dilakukan dengan menggunakan studi literatur terhadap artikel-artikel yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan analisis bibliometrik dan analisis konten. Bibliometrik dan analisis konten dipilih sebagai *framework* analisis karena akan membantu peneliti dalam memetakan tren penelitian terkait upaya penanggulangan kemiskinan, kontribusi penulisan serta informasi yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (Stemler, 2000; Zupic & Čater, 2014).

Dengan demikian, posisi kajian ini dalam analisis bibliometrik sebagai penelitian yang akan memetakan artikel-artikel tulisan ilmiah dalam pengentasan kemiskinan. Maka fokus review artikel yang akan dieksplor yaitu untuk melihat: (i) Bagaimana tren publikasi dan sitasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?; (ii) Bagaimana Co-authorship antar penulis dan afiliasi negara penulis?; (iii) Informasi apa yang bisa didapatkan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia?; (iv) Bagaimana perkembangan publikasi penelitian penanganan kemiskinan di Indonesia?.

2. METODE

Dalam studi ini, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan bibliometrik dan analisis konten. Dalam penelitian ini bibliometrik digunakan untuk membuat suatu peta ataupun menampilkan jaringan yang termuat dalam dokumen/teks serta berupaya memvisualisasikan hasil pemetaan tersebut yang dibantu dengan microsoft excel dan csv sebagai ekstraksi data dan Vosviewer sebagai aplikasi pendukung. Sedangkan untuk menganalisis makna dari topik atau isi yang dikaji dalam artikel yang dipilih akan menggunakan pendekatan analisis konten. Analisis konten membantu peneliti dalam mengkonstruksikan karakteristik dari teks ataupun dokumen baik dari sisi penyampaian argumen penulis, struktur penulisan untuk kemudian dituangkan dalam suatu deskripsi atau narasi terkait tema/topik tertentu (Neuendorf,

2017). Selain menganalisis suatu topik tertentu, teknik analisis konten ini juga dapat dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antar penulisan, tren atau pola dalam suatu dokumen serta mampu menyajikan analisis empiris dalam melihat opini publik terkait topik tertentu (Stemler, 2000). Adapun database yang dipilih dalam kajian ini adalah database scopus karena secara fungsi, database Scopus memiliki menu atau fitur analisis yang sangat banyak sehingga dapat memudahkan penulis dalam penjarangan artikel-artikel yang akan ditelusuri mulai dari tren penelitian yang berguna untuk menghindari terjadinya plagiasi sehingga terdapat kebaruan (*novelty*), serta informasi berkaitan dengan kepakaran, negara yang dituju (Lukman et al., 2019).

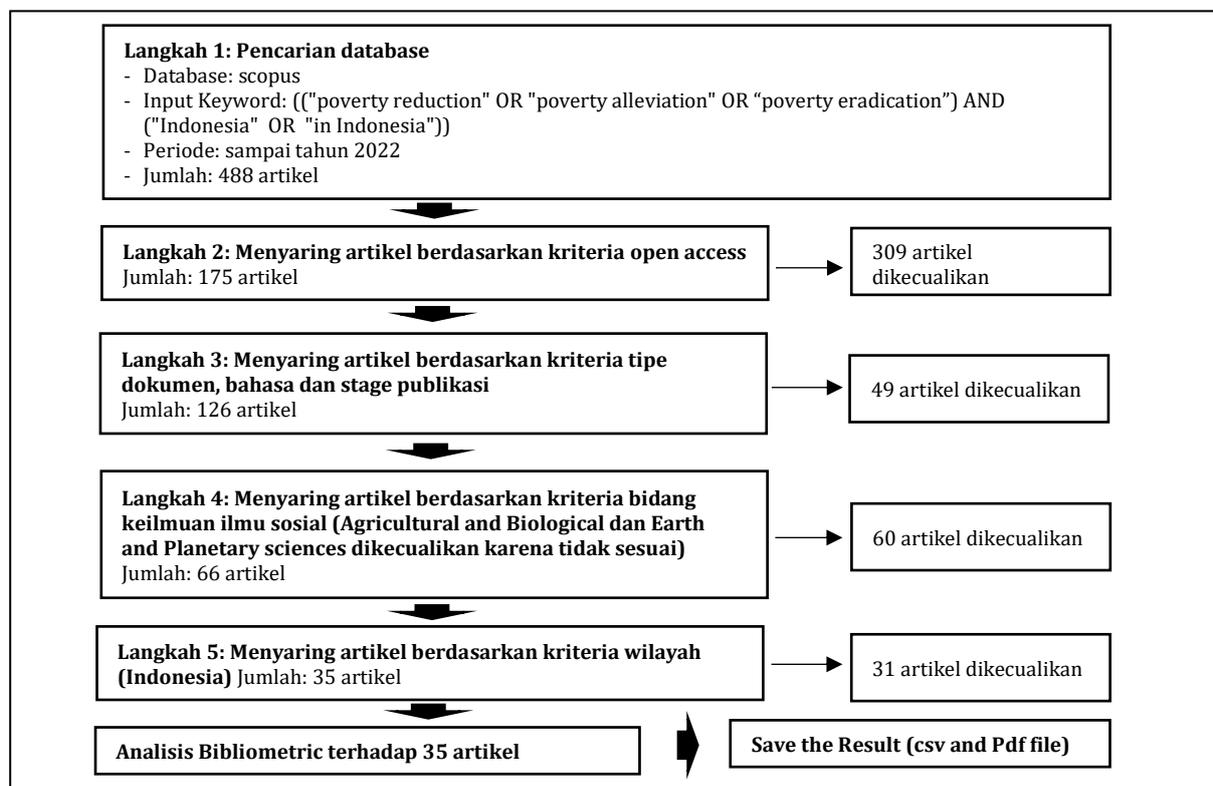
Dalam memulai penelitian, pencarian artikel dimulai dengan pencarian “*key term*” atau istilah-istilah yang digunakan dalam menggambarkan penanggulangan kemiskinan. Adapun protokol kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah TITLE-ABS-KEY (“poverty reduction” OR “poverty alleviation” OR “poverty eradication”) AND (“Indonesia” OR “in Indonesia”)) yang dianggap sebagai kata kunci yang sering digunakan. Adapun pemilihan tahun yaitu seluruh artikel yang terpublikasi sampai tahun 2022. Selain memilih kata kunci, dalam penelitian ini juga ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang menentukan artikel mana yang akan dipilih dan tidak dipilih dalam analisis bibliometrik. Kriteria inklusi dan eksklusi dapat dilihat pada halaman berikutnya (tabel 2).

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Aksesibilitas	Open Access	Non-Open Access
Tipe dokumen	Artikel	Book (Book Chapters), book Review, proceeding, Conference Paper
Bahasa	English	Non-English
Bidang keilmuan	Social Sciences	Non All Social Sciences
Publikasi	Final	On process
Wilayah/negara	Indonesia	Non-Indonesia
Reviewer process	Peer-reviewed	Non peer-reviewed
Aksebilitas	Full text	NonFull text

Sumber: diolah penulis (2023)

Dalam proses pencarian dan filterisasi artikel, dilaksanakan dalam 4 (empat) langkah yaitu pencarian artikel dari database, menyaring artikel berdasarkan kriteria *open access*, penyaringan artikel berdasarkan tipe dokumen, bahasa dan *stage* publikasi, penyaringan artikel berdasarkan kriteria bidang keilmuan dan pencarian artikel dengan kriteria wilayah yang dijelaskan pada Gambar 1.



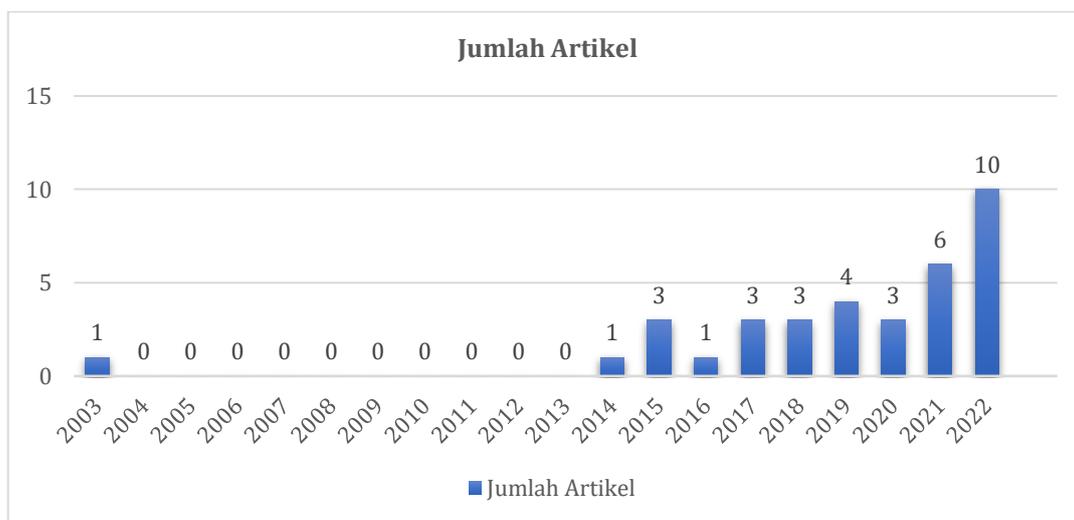
Gambar 1. Pencarian dan Filtrasi Bibliometrik

Setelah penyaringan/filterisasi dokumen, didapatkan 35 artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Ke- 35 artikel inilah yang kemudian digunakan dalam analisis penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Indonesia. Ke-35 artikel tersebut kemudian diunduh untuk kemudian dianalisis, untuk bibliometrik data diunduh dalam bentuk csv untuk kemudian diolah menggunakan aplikasi Vosviewer, sedangkan untuk analisis konten, seluruh dokumen diunduh dalam bentuk pdf untuk dianalisis. Analisis ke-35 artikel ini kemudian akan dibahas pada sub-bagian yang terbagi dalam menjawab pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Publikasi dan Sitasi

Dilihat dari tren publikasi, terlihat bahwa distribusi artikel penanggulangan kemiskinan mulai mendapatkan atensi penulisan akademik mulai dari tahun 2003 (n=1) dan cenderung meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun, dalam jeda dari tahun 2003 ke 2014 terjadi kekosongan publikasi. Publikasi tertinggi terlihat pada tahun 2022 dimana jumlah artikel yang terbit sebanyak 10 artikel (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Tren Publikasi pada Penelitian Penanggulangan Kemiskinan (2003-2022)

Sedangkan jika dilihat dari distribusinya pada beberapa jurnal, jurnal dengan jumlah naskah publikasi terbanyak (n=4) adalah *economics*, yang diikuti oleh *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (n=3) dan *Journal of Governance and Regulation* (n=2) (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Top 3 Jurnal dengan Publikasi Penanggulangan Kemiskinan Terbanyak

Jurnal	Rangking Index Jurnal	Jumlah Artikel
<i>Economics</i>	Q2	4
<i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i>	Q1	3
<i>Journal of Governance and Regulation</i>	Q4	2

Dari daftar publikasi terlihat bahwa jurnal dengan index scopus Q2 memiliki artikel terbanyak diterbitkan. Penerbitan artikel pada jurnal Q2 ini kesemua artikel diterbitkan pada tahun 2022, sedangkan pada artikel dengan index scopus Q1 diterbitkan pada tahun 2015 dan 2016 dan artikel dengan index scopus Q4 diterbitkan pada pada tahun 2021 dan 2022. Dilihat dari jumlah sitasi tabel 4 menunjukkan 10 besar artikel yang mendapatkan sitasi terbanyak. Dari tabel terlihat artikel yang dimuat dalam *Journal World Development* dengan Judul “Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia” merupakan artikel yang paling banyak disitasi (n=71). Kemudian diikuti oleh artikel *Evolution of poverty during the crisis in Indonesia* (n=29), *Does corporate social responsibility matter to consumers in indonesia?* (n=25), *Community-based rural tourism in interorganizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglangeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia* (n=24) dan *Growth, Poverty and Inequality under Jokowi* (n=23).

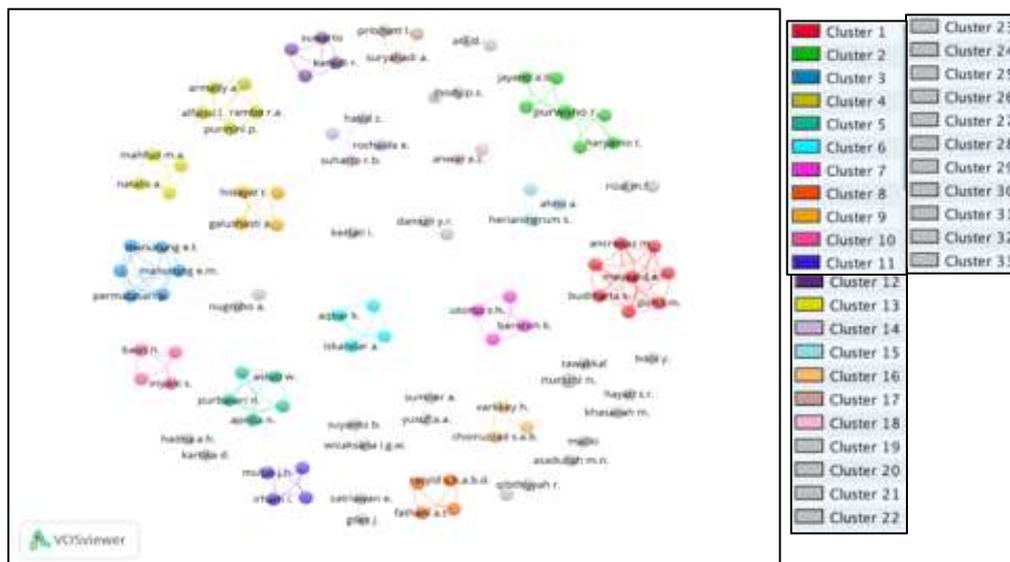
Tabel 4. Artikel dengan Sitasi Terbanyak

Title	Year	Source title	Citation
<i>Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia</i>	2019	<i>World Development</i>	71
<i>Evolution of poverty during the crisis in Indonesia</i>	2003	<i>Asian Economic Journal</i>	29
<i>Does corporate social responsibility matter to consumers in indonesia?</i>	2014	<i>Social Responsibility Journal</i>	25
<i>Community-based rural tourism in interorganizational collaboration: : How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia</i>	2018	<i>Sustainability (Switzerland)</i>	24
<i>Growth, Poverty and Inequality under Jokowi</i>	2015	<i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i>	23
<i>Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia</i>	2019	<i>SSM - Population Health</i>	13
<i>Survey of Recent Developments</i>	2015	<i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i>	13
<i>Madrasah for girls and private school for boys? The determinants of school type choice in rural and urban Indonesia</i>	2018	<i>International Journal of Educational Development</i>	12
<i>Protecting child nutritional status in the aftermath of a financial crisis: Evidence from Indonesia</i>	2015	<i>Journal of Development Economics</i>	10
<i>Deconstructing the palm oil industry narrative in indonesia: Evidence from riau province</i>	2018	<i>Contemporary Southeast Asia</i>	9

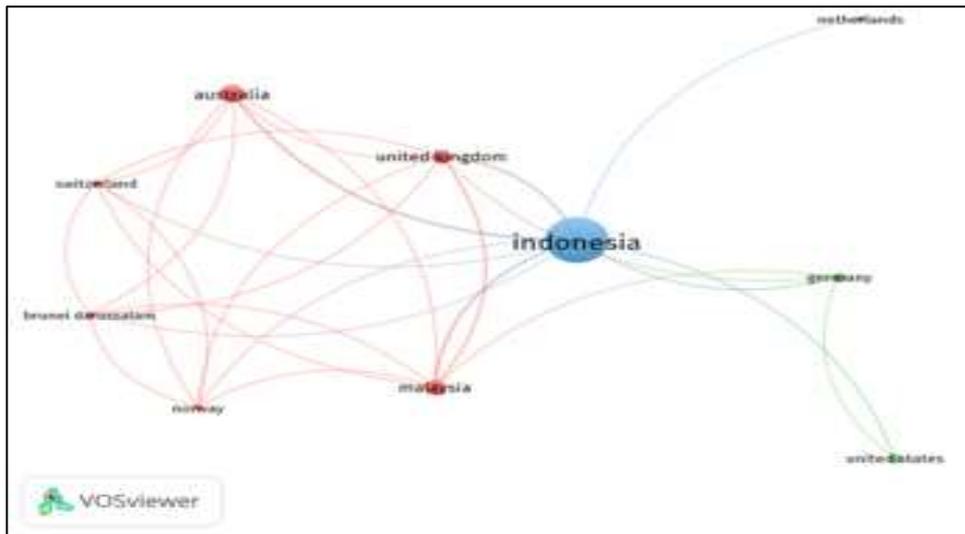
Co-Authorship

Pada bibliometrik, Co-authorship dapat digunakan dalam memvisualisasikan unit analisis berupa penulis, organisasi dan negara (van Eck & Waltman, 2018; Zupic & Čater, 2014). Dalam bibliometrik ini, unit analisis yang akan dianalisis adalah penulis yang bertujuan untuk melihat koneksi yang terhubung antar penulis.

Dari penelusuran dokumen, terdapat 106 penulis dengan minimal penulisan 1 artikel yang terbagi dalam 33 klaster (lihat gambar 3). Klaster terbentuk berdasarkan pengelompokan penulis yang terhubung dengan penulis lainnya. Dari 33 klaster, klaster dengan penulis terba nyak terdiri dari 1 klaster dengan jumlah penulis sebanyak 8 orang. Adapun klaster lain terdiri atas 1 klaster berisi 7 penulis, 1 klaster yang terdiri dari 6 penulis, 1 klaster yang terdiri dari 5 penulis, 9 klaster dengan 4 penulis, 3 klaster dengan 3 penulis, 14 klaster dengan 2 penulis dan 2 klaster dengan 1 penulis. Dari klaster dapat disimpulkan bahwa klaster penulis yang terdiri dari 2 orang penulis mendonimasi penulisan artikel.



Gambar 3. Co-authorship Unit Analisis Penulis (Sumber: Vosviewer, 2023)



Gambar 4. Negara Penulis (Sumber: Vosviewer, 2023)

Gambar 4 menunjukkan negara asal afiliasi penulis yang berkolaborasi dalam mempublikasikan artikel penanggulangan kemiskinan. Dari gambar terlihat semakin besar bulatan item suatu negara maka semakin banyak artikel yang dipublikasikan oleh penulis dari afiliasi negara penulis.

Tabel 5. Negara Afiliasi penulis

No	Negara	Jumlah Artikel
1	Indonesia	35
2	Australia	6
3	Malaysia	5
4	United Kingdom	4
5	Germany	2
6	United States	2
7	Brunei Darussalam	1
8	Switzerland	1
9	Netherlands	1

Tabel 5 menunjukkan negara asal afiliasi penulis beserta jumlah artikel yang telah dipublikasikan. Dari tabel terlihat penulis yang berasal dari Indonesia masih mendominasi penulisan artikel penanggulangan kemiskinan (n=35) yang diikuti oleh penulis asal Australia (n=6) dan Malaysia (n=5).

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dari analisis konten yang dilakukan pada ke-35 artikel, didapatkan hasil bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilaksanakan baik pada level pemerintahan pusat dan daerah. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan dilaksanakan baik dalam penerapan kebijakan dan juga program.

Tabel 6. Kebijakan/Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

No	Kebijakan/Program	Jenis
1	Kebijakan Alokasi Belanja Negara/Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perimbangan keuangan pusat dan daerah (desentralisasi fiskal: dana perimbangan dan dana transfer); - Alokasi Dana Desa (ADD); - pengeluaran berbasis dukungan pada pengentasan kemiskinanL - pengeluaran untuk pembangunan insfrastruktur dan belanja sosial;
2	Kebijakan Pembangunan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - green and blue economy - Perlindungan dan pemberdayaan nelayan; - Pengembangan UMKM;
3	Program Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Program bantuan tunai bersyarat, - Program bantuan sosial, - Program bantuan sosial (Bantuan Uang Tunai, subsidi minyak, Kartu Keluarga Sejahtera [KKS], Kartu Indonesia Pintar [KIP], Kartu Indonesia Sehat [KIS]);

4	Program industri pariwisata	- Industri pariwisata internasional; - Program pariwisata berbasis masyarakat pedesaan; - Pengembangan desa pariwisata.
5	Program pengembangan pertanian dan kehutanan	- Pengembangan pertanian; - Hutan desa; - Pengembangan kelapa sawit;
6	Program peningkatan kesehatan	- Program Tambahan makananan untuk mendukung anak usia dini;
7	Program peningkatan pelayanan public	- Layanan penanggulangan kemiskinan berdasarkan, pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi dan integritas data;
8	Kebijakan terkait pemerataan	- Kebijakan pengarusutamaan gender
9	Kebijakan pengelolaan filantropi islam	- Kebijakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf

Tabel 6 menunjukkan kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa kebijakan yang diambil dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mengatur belanja negara dan daerah seperti mengatur pengalokasian pengeluaran negara/daerah seperti pengaturan desentralisasi fiskal dengan dana perimbangan APBN dan dana transfer antar pemerintah, pengalokasian Dana untuk desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa, pengalokasian pengeluaran berbasis dukungan pada pengentasan kemiskinan, pengaturan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan belanja sosial.

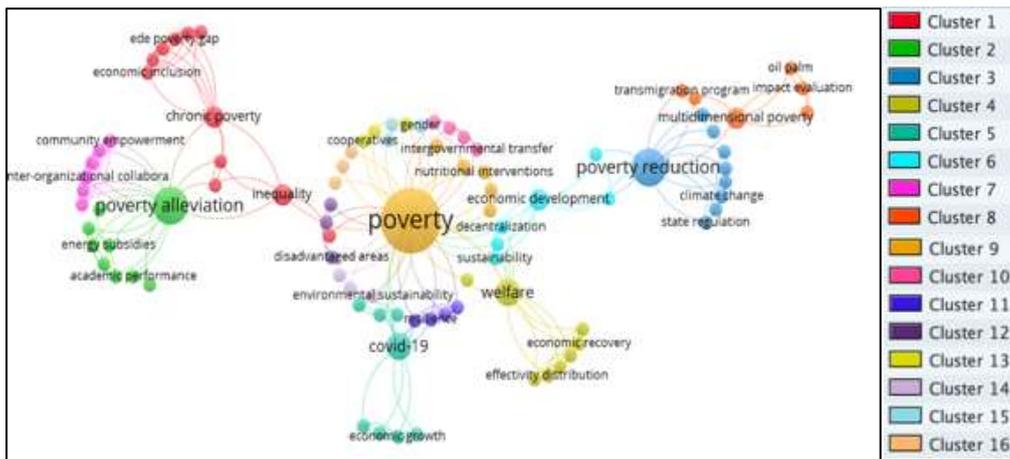
Selain berfokus pada kebijakan terkait pengeluaran pusat dan daerah, kebijakan lain difokuskan pada kebijakan pembangunan ekonomi dengan mengenalkan konsep *green economy* (pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan) dan *blue economy* (pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan). Beberapa kebijakan yang mulai mendapatkan perhatian, meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan adalah Kebijakan pengarusutamaan gender serta pengaturan kebijakan terkait pengaturan filantropi islam berupa zakat, infaq, sedekah dan waqaf.

Selain kebijakan makro yang dilakukan pemerintah, pemerintah juga melaksanakan beberapa program diantaranya program jaminan sosial yang meliputi program bantuan langsung tunai dengan syarat akibat imbas dari kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak pada target kelompok terdampak, program bantuan sosial, serta Program bantuan sosial (Bantuan Uang Tunai, subsidi minyak, Kartu Keluarga Sejahtera [KKS], Kartu Indonesia Pintar [KIP], Kartu Indonesia Sehat [KIS]).

Sementara itu, diluar dari kebijakan dan program berbasis jaminan sosial yang khusus ditujukan pada permasalahan kemiskinan secara langsung, terdapat beberapa program lain yang digunakan pemerintah sebagai upaya penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia diantaranya yaitu Program industri pariwisata, Program pengembangan pertanian dan kehutanan, Program peningkatan kesehatan, Program peningkatan pelayanan publik, Kebijakan terkait pemerataan serta Kebijakan pengelolaan filantropi islam.

Visualisasi Perkembangan Publikasi Penanganan Kemiskinan berdasarkan Kata Kunci yang ditentukan oleh Penulis (Author's Co-Occurrence)

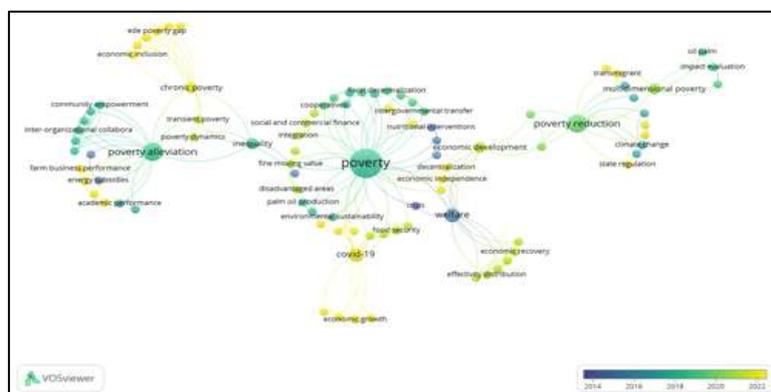
Setelah peneliti mendapatkan informasi isi dari artikel yang telah dipilih, pertanyaan selanjutnya yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan publikasi terkait penanganan kemiskinan di Indonesia. Untuk melihat perkembangan publikasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan keterkaitan kata kunci penelitian (*Co-occurrence*). Aplikasi Vosviewer dapat membantu melihat peta jaringan dengan membuat suatu visualisasi dalam bentuk *network*, *overlay* dan *density* (Zakiyyah et al., 2022). Jaringan yang terbentuk nantinya akan membentuk *item* dan *link*. Jika *item* dimaknai sebagai visualisasi berupa bulatan atau lingkaran yang menunjukkan objek yang sedang dianalisis, maka *link* menunjukkan simpul jaringan yang menunjukkan keterkaitan antar *item* (van Eck & Waltman, 2018). Dalam analisis jaringan ini *item* yang diamati adalah kata kunci yang ditentukan oleh penulis (*Author's Co-occurrence*) dengan menggunakan minimum kata kunci yang muncul sebanyak 1 kali pada abstrak, judul dan kata kunci pada artikel. Ukuran dari item mengindikasikan jumlah publikasi. Semakin besar ukuran item, maka semakin sering kata kunci tersebut muncul dalam publikasi. Dari 104 kata kunci yang muncul dalam pencarian, langkah selanjutnya adalah memilah kata kunci yang relevan dengan penelitian, sehingga didapatkanlah 93 item yang terbagi dalam 16 klaster.



Gambar 5. Visualisasi Jaringan Co-occurrence berdasarkan Kata Kunci Penulis (Sumber: Vosviewer, 2023)

Gambar 5 menunjukkan visualisasi jaringan berdasarkan keterhubungan kata kunci yang digunakan penulis. Klaster 1 terdiri atas 11 item yaitu *chronic poverty, economic inclusion, ede poverty gap, inclusive growth, inequality, poverty dynamics, poverty eradication, poverty line, social welfare, transient poverty, urban poverty*. Klaster 2 terdiri atas 9 item yaitu *academic performance, agricultural development, conditional cash transfer, energy subsidies, farm business performance, farmer resources, fiscal reform, poverty alleviation, rural infrastructure facilities*. Klaster 3 terdiri atas 9 item yaitu *climate change fisher women, gender mainstreaming, legal reform, policy redirection, policy reduction, public service, state regulation, structural factors*. Klaster 4 terdiri atas 8 item yaitu *crisis, economic recovery, effectivity distribution, islamic insurance, islamic philanthropy, productive zakat, recovery disasters, welfare*. Klaster 5 terdiri atas 8 item yaitu *covid-19, economic growth, efficiency, income distribution, pandemic impacts, poverty reduction, regional tourism CGE modeling, spending on pro-growth poverty reduction*. Klaster 6 terdiri atas 6 item yaitu *medium enterprises, decentralization, economic development, economic independent, labor absorption, sustainability*. Klaster 7 terdiri atas 6 item yaitu *community empowerment, community-based tourism, inter-organizational collaboration, local community, stakeholder, sustainable tourism*. Klaster 8 terdiri atas 6 item yaitu *human well-being, impact evaluation, multidimensional poverty, oil palm, transmigrant, transmigrant program*

Klaster 9 terdiri atas 6 item yaitu *financial crises, nutritional intervention, poverty, program evaluation, SDGs, zakat*. Klaster 10 terdiri atas 5 item yaitu *fiscal decentralization, intergovernmental transfer, own source revenue, regional expenditure*. Klaster 11 terdiri atas 4 items yaitu *food security, new normal, resilience, women*. Klaster 12 terdiri atas 4 item yaitu *behavioral anomalies, disadvantaged areas, fine moving value*. Klaster 13 terdiri atas 3 item yaitu *cooperatives, empowerment, microfinance*. Klaster 14 terdiri atas 3 item yaitu *enviromental sustainable, palm oil production, rural development*. Klaster 15 terdiri atas 3 item yaitu *gender, madrasah education, scholl choice*. Klaster 16 terdiri atas 3 item yaitu *integration, philanthropy, social and commercial*. Setelah memetakan klaster dengan visualisasi jaringan, pemetaan lain dapat dilakukan dengan melihat jejak historis dan perkembangan publikasi. Visualisasi dengan menggunakan aplikasi Vosviewer dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 6. Visualisasi Overlay berdasarkan Authors' Co-occurrence (Sumber: Vosviewer, 2023)

penulis terbagi dalam 33 klaster, klaster dengan penulis terbanyak terdiri dari 1 klaster dengan jumlah penulis sebanyak 8 orang. Selanjutnya untuk afiliasi negara penulis didominasi dari Indonesia sebanyak 35 penulis. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa telah banyak upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan diantaranya tentang Kebijakan Alokasi Belanja Negara/Daerah misalnya Alokasi Dana Desa (ADD). Berikutnya perkembangan publikasi penelitian penanganan kemiskinan di Indonesia ditemukan beberapa kata kunci yang masih jarang dilakukan penelitian diantaranya yaitu *recovery disaster*, *zakat*, *fiscal reform*, *economic inclusion* dan *chronic poverty*. Sehingga penelitian-penelitian berkaitan dengan kata kunci tersebut berpotensi untuk dikaji lebih dalam lagi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia agar memiliki keterbaruan dan *gap research*. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa intervensi dalam pengentasan kemiskinan tidak terbatas pada intervensi langsung yang merujuk pada penyebab utama terjadinya kemiskinan. Lebih dari itu, intervensi yang sifatnya tidak langsung, juga menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai langkah preventif dalam mencegah kemiskinan. Baik kedua intervensi ini akan sangat berdampak jika dilaksanakan secara simultan. Selain itu, karena sifatnya yang bersumber dari penelitian literatur, penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan dalam menggambarkan fenomena empirik, namun hasil penelitian ini dapat digunakan dalam memetakan dan mengevaluasi program yang telah ada serta tema penelitian yang terindikasi mampu membantu pengentasan kemiskinan namun masih sedikit dieksplor untuk kemudian bisa dipertimbangkan dalam penelitian ataupun kajian oleh pemerintah.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mengucapkan kepada rekan tim yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian artikel ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim Editorial dan Tim Reviewer Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alika, R. (2018). *Stafsus Jokowi Paparkan Program Penurunan Kemiskinan 7 Era Presiden RI*. <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55ba8c6bc/stafsus-ekonomi-jokowi-paparkan-program-kemiskinan-tujuh-era-presiden-ri>
- Amani, N. K. (2022). *Indonesia Masuk Daftar 100 Negara Paling Miskin di Dunia*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5084740/indonesia-masuk-daftar-100-negara-paling-miskin-di-dunia>
- Arifuzzaman, M., Rafee, F. E. R., & Islam, M. J. (2021). Exploration of Poverty and Human Rights Violation: A Legal Analysis. *Asian Journal of Social Sciences and Legal Studies*, 3(1), 10–22. <https://doi.org/10.34104/ajssls.021.010022>
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Baumgartner, R. J. (2014). Managing Corporate Sustainability and CSR: A Conceptual Framework Combining Values, Strategies and Instruments Contributing to Sustainable Development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 21(5), 258–271. <https://doi.org/10.1002/csr.1336>
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Cinar, E., Simms, C., Trott, P., & Demircioglu, M. A. (2022). Public sector innovation in context: A comparative study of innovation types. *Public Management Review*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2080860>
- Cristy, R., Boer, R. F., & Kusumadewi, R. I. (2022). Pemenuhan Kebutuhan Informasi Program-Program Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial bagi Masyarakat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 442–455. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i3.3087>
- David, K. B., Aborode, A. T., Olaoye, D. Q., Enang, N. V., Oriyomi, A. K., & Yunusa, I. (2021). Increased Risk of Death Triggered by Domestic Violence, Hunger, Suicide, Exhausted Health System during COVID-19 Pandemic: Why, How and Solutions. *Frontiers in Sociology*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.648395>
- Govender, K., Cowden, R. G., Nyamaruze, P., Armstrong, R. M., & Hatane, L. (2020). Beyond the Disease: Contextualized Implications of the COVID-19 Pandemic for Children and Young People Living in Eastern and Southern Africa. *Frontiers in Public Health*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00504>
- Hadi, A., Soewarsono, S., Lan, T. J., & Jati, W. R. (2019). *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan Ruang Sosial, Kebijakan, dan Pola Kerentanan Sosial*. LIPI Press. <https://doi.org/10.14203/press.215>

- Hilda, T., Prabowo, H., & Sartika, I. (2022). Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(2), 29–43. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2807>
- Humas UIR. (2022). *Resesi Ekonomi 2023, Apa yang Akan Terjadi di Indonesia?* <https://uir.ac.id/resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html>
- Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is It Eradicating Poverty? *Policy & Governance Review*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.169>
- Lukman, L., Hidayat, D. S., Al-Hakim, S., & Nadhiroh, I. M. (2019). *Pengukuran Kinerja Riset: Teori dan Implementasi*. LIPI Press.
- Neuendorf, K. A. (2017). *The content analysis guidebook*. SAGE Publications Inc.
- Nurfindarti, E. (2019). Strategy and Roadmap for Achieving Sustainable Development Goals in Serang City. *Jurnal Bina Praja*, 21, 219–235. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.219-235>
- Nurhanisah, Y. (2022). *Maret 2022, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun*. Indonesia Baik ID. <https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Perpres RI No 166 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 184, 1–27.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Purnomo, S. D., & Istiqomah, I. (2019). Economic Growth and Poverty: The Mediating Effect of Employment. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(1), 238–252. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18591>
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324. <https://doi.org/10.22146/jsp.11009>
- Redaksi OCBC NISP. (2022). *10 Negara Paling Miskin di Dunia, Apa Indonesia Termasuk?* OCBC NISP. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/31/negara-paling-miskin-di-dunia>
- Roziqin, A., Retnandari, N., Fajrina, A., Sihidi, I., & Kamil, M. (2021). The Local Government and Creative Industry: Experience from Batik Tulis Lasem Industries. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 419–429. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.419-429>
- Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34>
- Torring, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Management Review*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248>
- Tristanto, A., Yunilisiah, Y., & Bangsu, T. (2022). Community Response to Change of Social Assistance Scheme Family Hope Program During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 361–372. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.361-372>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2018). *VOSviewer Manual*. https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.8.pdf
- Wirba, A. V. (2023). Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01185-0>
- Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian arsitektur informasi pada Google Scholar menggunakan VOSviewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(1), 43–60. <https://doi.org/10.24198/inf.v2i1.37766>
- Zupic, I., & Čater, T. (2014). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>